

**Analisis SIMAK-BMN dalam Pengendalian Internal Barang Milik Negara
(Studi pada Balai Bahasa Yogyakarta)**

Agnes Hartanti

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: aagneshartanti.ah@gmail.com

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini menganalisis kesuksesan implementasi SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara di Balai Bahasa Yogyakarta menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) dan Dukungan Eksekutif.

Metode penelitian – Deskriptif kualitatif menggunakan metode pengumpulan data meliputi kuesioner, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Peneliti menyebarkan 35 kuesioner sebagai sampel. Wawancara semi terstruktur dilakukan pada 3 narasumber yaitu operator, verifikator dan validator. Dokumentasi terkait Laporan CRMN Ekstrakomptabel, dan Laporan CRBMN Intrakomptabel, Lembar Disposisi, dan Berita Acara Rekonsiliasi.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, dukungan manajemen puncak, kepuasan pengguna dan faktor manfaat bersih sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi SIMAK-BMN, sedangkan faktor penggunaan cukup mempengaruhi kesuksesan implementasi SIMAK-BMN. Selain itu, SIMAK-BMN sebagai sistem yang fleksibel. *User* SIMAK-BMN, dukungan manajemen puncak dan organisasi Balai Bahasa Yogyakarta dalam tahap belajar dan membangun *strategic assets*.

Originalitas – Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah kesuksesan implementasi SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik Negara dengan menggabungkan dua teori dasar yang digunakan sebagai pedoman penelitian yaitu Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) dan Dukungan Eksekutif.

Kata kunci: Implementasi SIMAK-BMN, Barang Milik Negara, Sistem Informasi, Pengguna SIMAK-BMN, Fleksibilitas Sistem.

1. Pendahuluan

Keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan masyarakat era reformasi yang diharapkan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat bisa turut mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang handal dan relevan. Hal itu menjadi lebih mudah jika didukung oleh sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, *stakeholder* dapat terbantu dalam pengambilan keputusan dan pengendalian internal. Selain itu, informasi keuangan mencerminkan

transparansi dari transaksi operasional, investasi dan pembiayaan, serta kenaikan atau penurunan kas suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu.

Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyatakan informasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memengaruhi fiskal dan non fiskal untuk menggerakkan perekonomian yang sehat, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya DJPB membuat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara, sedangkan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, dirancang Sistem Keuangan Negara (SAK). SIMAK-BMN dan SAK merupakan subsistem dari Standar Akuntansi Instansi (SAI) yang saling berjalan secara simultan. Oleh karena itu, dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

SIMAK-BMN merupakan penyempurnaan dari sistem yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara yang awalnya bernama SAAT (Sistem Akuntansi Aset Tetap), kemudian berubah menjadi aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan pada

akhirnya menjadi aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK-BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari perolehan, perubahan, dan penghapusan barang milik negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikemukakan bahwa semua barang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengamanan dan pengendalian terhadap Barang Milik Negara (BMN). Pengamanan dan pengendalian yang dimaksudkan meliputi fisik, administratif, dan hukum.

American Insititute of Accounts (AIA) dalam Supriyono (2016) mendefinisikan pengendalian internal adalah rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran yang dikoordinasi, yang digunakan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial.

Hall (2017 : 180) dalam (Nasrudin, 2015) menyatakan bahwa untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang berkarakter dan efektif, pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi memerlukan sistem pengendalian internal dan manajemen suatu organisasi diharuskan untuk

membuat dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai.

Pengendalian administratif merupakan bagian dari pengendalian internal. SIMAK-BMN memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan yaitu berkaitan dengan rekening persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Selain itu, SIMAK-BMN berfungsi sebagai sistem penatausahaan BMN dalam hal rencana pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan (*disposal*). Pada umumnya satuan kerja tidak dapat memilih untuk menggunakan SIMAK-BMN karena keberadaan suatu keharusan.

Pada umumnya satuan kerja tidak dapat memilih untuk menggunakan SIMAK-BMN karena keberadaan SIMAK-BMN merupakan suatu keharusan. Keberhasilan implementasi SIMAK-BMN akan membantu kinerja setiap satuan kerja pemerintahan dalam hal pengendalian internal barang milik negara. Kesuksesan dan kegagalan implementasi sistem informasi dipengaruhi beberapa faktor yang kompleks. Kegagalan-kegagalan dalam implementasi sebuah sistem informasi oleh Jogiyanto (2007) dibedakan menjadi aspek teknis dan nonteknis. Aspek teknis adalah aspek yang menyangkut kualitas teknis sistem informasi. Aspek nonteknis berkaitan dengan persepsi pengguna sistem informasi yang menyebabkan pengguna mau atau tidak mau menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan.

Di sisi lain, implementasi SIMAK-BMN merupakan usaha dalam mengatasi kelemahan-kelemahan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Keberhasilan implementasi sistem dipengaruhi beberapa faktor yang

kompleks. DeLone dan McLean (2003) melakukan studi yang mendalam mengenai kesuksesan sistem informasi dan mereka menunjukkan bahwa *information quality, system quality, dan service quality* akan berpengaruh positif pada *use* dan *user satisfaction* dan selanjutnya akan berpengaruh positif pada *net benefit*.

Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berada di bawah Pusat Bahasa. Dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis dan administratif Balai Bahasa dibina oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Bahasa. Sementara itu, Pusat Bahasa berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Departemen Pendidikan Nasional berada di bawah Sekretariat Jenderal. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Kepala Balai Bahasa Yogyakarta, bahwa tahun 2018 Balai Bahasa Yogyakarta dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi tidak lolos sehingga tahun 2019 dilakukan pembenahan untuk dijadikan sampel pemeriksaan kembali pada tahun 2020.

Beberapa kegagalan implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta adalah yang pertama dengan aset bernilai negatif, sehingga perlu dilakukan normalisasi, sehingga aset bernilai negatif harus dihilangkan dengan cara memunculkan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang baru sehingga NUP lama hilang diganti dengan NUP baru. Saat NUP lama dihilangkan dan diganti NUP baru,

dibuat seakan barang tersebut belum ada status pemilikinya padahal sudah ada status pengguna di NUP yang lama. Kedua, dalam SIMAK-BMN transaksi penyusutan tidak dapat tercatat dengan benar, saat terjadi pembelian aset tetap yang terjadi bulan Desember seharusnya penyusutan diakhir bulan baru dihitung satu bulan tetapi di SIMAK-BMN penyusutan terjadi enam bulan (satu semester). Ketiga, kesalahan pemilihan kode barang yang tidak dapat difilter melalui proses rekonsiliasi. Kebenaran pemilihan kode barang terhadap penginputan transaksi pembelian suatu barang hanya dapat dilihat dari pemeriksaan secara manual terhadap hasil cetakan laporan. Keempat, ada barang yang rusak berat, tetapi dalam laporan masih tertulis dalam kondisi baik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan asumsi tidak membaca dan menggunakan temuan pemeriksaan BPK tahun 2018. Selain itu, peneliti berasumsi tidak membahas *knowledge transformation*, tetapi menggunakan *organizational knowledge* atas Sistem Informasi. Kedua asumsi ini dilakukan oleh peneliti untuk menghindari bias hasil penelitian.

Satuan kerja pemerintah seharusnya mulai tanggap terhadap implementasi SIMAK-BMN sehingga bisa menjadi tolok ukur analisis SIMAK-BMN dan melakukan perbaikan pada sistem ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara

2. Latar Belakang Teori dan Kajian Pustaka

Perkembangan sistem informasi memicu dinamika dan paradigma baru dari sisi manajemen dan bidang apapun termasuk pengelolaan data. Jogiyanto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan sistem informasi dalam organisasi merupakan salah satu investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, kesuksesan sistem informasi yang digunakan menjadi salah satu tujuan organisasi.

DeLone dan McLean (1992) melakukan penelitian mendalam tentang kesuksesan sistem informasi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesuksesan sistem informasi dipresentasikan oleh enam faktor, yaitu kualitas sistem informasi (*system quality*), kualitas *ouput* dari sistem informasi (*information quality*), konsumsi terhadap *output* (*use*), respon atau kepuasan pengguna terhadap sistem informasi (*user satisfaction*), dan pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna (*individual impact*) dan pengaruh terhadap kinerja (*organizational impact*). Model ini dikenal sebagai Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (*D&M IS Success Model*).

Dalam perkembangan pengetahuan dan berdasarkan kritik dan saran tersebut, DeLone dan McLean (2003) memperbarui modelnya dengan beberapa perubahan, sebagai berikut memasukkan dimensi kualitas pelayanan (*Service Quality*), menambahkan *dimensi intention to use* sebagai alternatif dari dimensi pemakaian (*use*)

dan minat pemakai adalah suatu sikap (*attitude*), sedangkan pemakaian adalah perilaku (*behavior*).

Kualitas sistem ialah kemampuan suatu sistem yang terdiri atas *hardware*, *software*, kebijakan, dan prosedur sistem informasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian J.Iivari (Saputro, Budiyanto dan Santoso, 2015) terdiri atas enam skala pengukuran, yakni fleksibilitas sistem (*system flexibility*), integrasi sistem (*system integration*), waktu respon (*time to respon*), perbaikan kesalahan (*error recovery*), kenyamanan akses (*convinience of access*), dan bahasa (*language*).

DeLone dan McLean (1992: 64) menyatakan bahwa kualitas informasi mengukur kualitas *output* dari sistem, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sitem informasi, terutama dalam bentuk laporan-laporan. Kualitas informasi berkaitan dengan keakuratan data untuk diproses. J.Iivari (Saputro, Budiyanto dan Santoso, 2015) menggunakan lima skala pengukuran sebagai berikut: kelengkapan (*completeness*), ketepatan (*precision*), keandalan (*reliability*), data selalu diperbaharui (*currency*), dan bentuk dari keluaran (*format of output*).

Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas layanan merupakan keseluruhan dukungan yang ditawarkan bagian teknologi informasi komunikasi dan penyedia layanan kepada para pengguna untuk memastikan bahwa sistem dapat diaplikasikan dengan baik, baik secara internal maupun eksternal. Adapun tiga komponen yang dikemukakan antara lain jaminan

(*assurance*), empati (*system empathy*) dan *system responsiveness*.

Jarvenpaa dan Ives (Jogiyanto, 2008: 429) menggunakan istilah dukungan eksekutif untuk menunjukkan baik partisipasi maupun keterlibatan eksekutif. Pemakai sistem terdiri atas teknisi, pengoperasian sistem (*operator*), manajer, dan pemakai luar perusahaan. Menurut Barki dan Hartwick (Jogiyanto, 2008: 430) partisipasi eksekutif berhubungan dengan perilaku-perilaku dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, partisipasi digunakan untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas CEO atau intervensi-intervensi personal yang substantif yang dilakukan di pengelolaan teknologi informasi.

Saputro, Budiyanto dan Santoso (2015) mengatakan bahwa penggunaan (*use*) dibedakan menjadi dua macam, yaitu penggunaan keluaran (*information use*) dan penggunaan sistem (*system use*) yang berarti penggunaan informasi dan penggunaan sistem informasi itu sendiri.

DeLone dan McLean (1992: 68) menyatakan bahwa kepuasan para pengguna mengacu (*user satisfaction*) pada respon yang diberikan pengguna. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. DeLone and McLean (2003) menggunakan dua *item* yaitu kepuasan informasi (*repeat purchase*) dan kepuasan menyeluruh (*repeat visit*).

Net benefit adalah hasil bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh individu dan organisasi setelah

menerapkan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan lima dari enam *item* yang diadaptasi dari ukuran persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), yakni *speed of accomplishing task, job performance, effectiveness, ease of job, dan usefulness in work*.

Berdasarkan modul SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip antara lain ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif dan kelengkapan.

Penelitian Terdahulu

Rahardiyanti, A., Abdurachman, E (2012) meneliti efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap pengelolaan asset negara. Penelitian ini menjelaskan *critical success factor* di atas berpengaruh (56,4%) terhadap sukses tidaknya Efektivitas SIMAK-BMN. Selain itu, dari dari ke enam faktor yang diduga memengaruhi Efektivitas SIMAK-BMN dan didapatkan hanya ada 3 (tiga) faktor yang secara signifikan mempengaruhi Efektivitas SIMAK-BMN yang terdiri atas kegunaan sistem, kemudahan sistem, dan kualitas sistem, sedangkan tiga faktor lainnya, yaitu faktor kualitas informasi, lama penggunaan SIMAK-BMN, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan. Berdasarkan hasil koefisien dari ketiga faktor di atas faktor kegunaan sistem memiliki koefisien yang paling besar, berikutnya faktor kemudahan sistem memiliki koefisien terbesar kedua, dan yang terakhir faktor kualitas

sistem dalam Efektivitas SIMAK-BMN.

Wijaya, H., Nadirsyah dan Darwanis (2013, melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap aplikasi SIMAK-BMN pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh.

Penelitian ini menjelaskan hasil pengujian secara parsial menunjukkan yang pelayanan staf EDP berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan atas sistem aplikasi sebesar 31% atau setiap 100% peningkatan pemahaman akuntansi, maka secara relatif akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi informasi sebesar 31%. Selain itu, pengetahuan pengguna berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sebesar 41,8% atau setiap 100% peningkatan pengetahuan pengguna maka secara relatif akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem aplikasi informasi sebesar 41.8%. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelayanan staf, pengetahuan pengguna, secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna terhadap SAK dan SIMAK-BMN Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh, (2) Pelayanan Staf berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi SAK dan SIMAK-BMN Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh, dan (3) pengetahuan pengguna berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi SAK dan SIMAK-BMN Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh.

Edy Nasrudin (2013) mengevaluasi efektivitas SIMAK-BMN di Departemen Kebudayaan

dan Pariwisata Republik Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa (a) implementasi SIMAK-BMN dari sisi user atau pengguna, telah berjalan dengan efektif dengan catatan pegawai yang ditempatkan sebagai operator sistem memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN, minim *error* dan berkualitas karena dapat bertahan lebih dari 1 (satu) dasawarsa dengan output yang tidak sedikit. (b) dari sisi produk yang dihasilkan berupa kualitas informasi BMN yang digunakan oleh suatu entitas akuntansi barang, telah berjalan dengan efektif. Walaupun masih terjadi kesalahan, jumlahnya tidak signifikan sehingga kualitas laporan yang dihasilkan masih dianggap wajar. Hal ini terbukti dari status Opini WTP semakin banyak diraih oleh kementerian atau lembaga. (c) faktor dukungan manajemen puncak dan formalisasi pengembangan sistem terlihat dari *effort* dari pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan yang ingin mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang akuntabel dan transparan.

Trisna Dewi, S.A.N dan Dewirandra, AANB (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna aktual dan kepuasan pengguna terhadap implementasi sistem informasi keuangan daerah di Kota Denpasar. Penelitian ini menjelaskan bahwa (1) dukungan manajemen puncak berperan pada implementasi sistem informasi keuangan daerah, (2) Kualitas sistem tidak berpengaruh pada implementasi sistem informasi

keuangan daerah, (3) Kualitas informasi berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah, (4) Pengguna aktual tidak berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah, dan (5) Kepuasan pengguna berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah.

Saputro, Pujo Hari., Budiyanto, A., Djoko., Santoso Alb. Joko (2015) menggunakan Model DeLone dan McLean untuk mengukur kesuksesan E-Government Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun dengan mengadaptasi variabel yang ada pada model DeLone and McLean, yang selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja *E-government* Pemerintah Kota Pekalongan.

Proposisi

Semakin fleksibel Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), maka semakin meningkatkan optimisme Balai Bahasa Yogyakarta untuk menerima dan mengimplementasikan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahamai lebih mendalam gambaran penerapan SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara di Balai Bahasa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi wawancara dan data sekunder meliputi dokumentasi. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur pada tiga nara sumber

yaitu operator, verifikasi, dan validator; kuesioner yang disebar sebanyak 35 kuesioner tetapi yang kembali pada peneliti 34 kuesioner. Kuesioner disebar pada pengguna SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta dan dokumentasi terkait Laporan CRMN Ekstrakomptabel, dan Laporan CRBMN Intrakomptabel, Lembar Disposisi, dan Berita Acara Rekonsiliasi, dan struktur organisasi internal Balai Bahasa Yogyakarta.

Penelitian ini akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi dan *member checking*. Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan pernyataan dari auditor eksternal. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengecek hasil transkrip wawancara, memastikan tidak ada definisi, kalimat dan makna yang bias serta melakukan pengecekan kode.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan data, memilah-milah data yang dikelola, mencari dan menemukan sesuatu yang penting sesuai dengan topic SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara.

Langkah-langkah analisis data, sebagai berikut:

1. Peneliti menyiapkan daftar kuesioner, kemudian membandingkan jawaban responden dengan jumlah jawaban responden dengan cara membandingkan dalam bentuk angka dan dijelaskan serta diinterpretasikan dengan cara dijumlahkan kemudian dibandingkan dengan jumlah

- yang diharapkan sehingga diperoleh persentase. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam kuesioner, pilihan jawaban yang diberikan responden adalah “Ya” = 1 atau “Tidak” = 0. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden yang dianalisis menggunakan ketentuan Dean J. Champion (Febryan, 2015).
2. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara semi terstruktur dan menyiapkan transkrip data yang telah disusun dari hasil wawancara dan dirangkum secara ringkas dengan mengambil data yang penting saja. Selanjutnya peneliti menyamarkan identitas partisipan dengan inisial tertentu yang bertujuan menjaga kerahasiaan dan anonimitasnya.
 3. Peneliti melihat, membaca, dan memahami keseluruhan data. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami garis besar dan inti pokok pikiran yang disampaikan oleh partisipan.
 4. Peneliti membuat kode dan mengidentifikasi kode angka telah didapatkan lalu menempatkan pada buku kode (*codebook*). Pengidentifikasian kode ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi rentang permasalahan yang timbul pada data dan sebagai penanda dalam memberikan kemudahan peneliti untuk memfokuskan suatu masalah yang lebih rinci di dalam data.
 5. Peneliti melakukan pengkategorian tema yang didasarkan atas kode-kode yang telah dihasilkan dari proses pengkodean dengan bentuk deskripsi. Peneliti akan mengkategorikan kode-kode atas jawaban yang diberikan partisipan sehingga nantinya dapat dilihat perbedaan jawaban partisipan sehingga perlu diubah dalam bentuk deskripsi.
 6. Peneliti menyajikan dalam bentuk narasi dari hasil wawancara pada pengguna SIMAK-BMN dan hasil pengkategorian kode yang bertujuan menjelaskan hasil temuan melalui deskripsi kronologi kejadian, deskripsi perincian hasil temuan dan deskripsi untuk menjelaskan tema yang saling terkait.
 7. Peneliti membuat interpretasi atas hasil atau temuan penelitian SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara yang sudah dilakukan.

Tabel 3.1 : Skala Persentase Implementasi SIMAK-BMN

Persentase	Kriteria Penilaian
0% - 25%	Implementasi SIMAK-BMN tidak sukses
25% - 50%	Implementasi SIMAK-BMN kurang sukses
50% - 75%	Implementasi SIMAK-BMN cukup sukses

75% - 100%

Implementasi SIMAK-BMN sangat sukses

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas kesuksesan implementasi SIMAK-BMN dalam pengendalian barang milik negara di Balai Bahasa Yogyakarta. Berdasarkan 34 kuesioner yang kembali pada peneliti, didapat kualitas informasi 98%, kualitas sistem 76%, kualitas pelayanan 86%, dukungan manajemen puncak 86%, kepuasan pengguna 90% dan manfaat bersih 85%, artinya dari enam faktor tersebut mempengaruhi kesuksesan implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta, tetapi faktor penggunaan hanya 56% artinya faktor penggunaan cukup mempengaruhi kesuksesan implementasi SIMAK-BMN.

Berdasarkan proposisi yang dirumuskan oleh peneliti di Bab 2 berkaitan dengan fleksibilitas sistem, peneliti mengacu pada *dynamic capability theory* yaitu kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat. Sumber daya manusia dan organisasi memerlukan kemampuan untuk belajar dan membangun *strategic assets*, yang terdiri dari kemampuan, teknologi, dan *feedback pelanggan* yang harus diintegrasikan dalam perusahaan. SIMAK-BMN dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang fleksibel. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yaitu faktor kepuasan pengguna sebesar 86%, dukungan manajemen puncak sebesar 86% dan manfaat bersih sebesar 85% artinya tiga faktor ini sangat mempengaruhi

implementasi SIMAK-BMN dalam pengendalian internal barang milik negara berdasarkan kriteria penilaian kesuksesan implementasi SIMAK-BMN.

Pembuktian lain dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketiga narasumber dijelaskan bahwa Balai Bahasa Yogyakarta memilih menggunakan SIMAK-BMN untuk pengelolaan dan pengendalian barang milik negara karena dianggap lebih efektif dan bisa digunakan sebagai *monitoring* aset tetap, persediaan, perlengkapan, dan inventarisasi. *User* SIMAK-BMN mendukung dilakukan pembaharuan aplikasi sesuai yang diperlukan oleh satuan kerja karena berdasarkan hasil wawancara narasumber kedua, kode-kode dalam aplikasi tidak bisa digunakan terus menerus karena tidak sesuai dengan kondisi fisik barang yang ada di lapangan. Selain user SIMAK-BMN, manajemen puncak Balai Bahasa mendukung sepenuhnya penggunaan SIMAK-BMN dalam rangka pengelolaan barang milik Negara yang bertujuan sebagai pengendalian fisik dan administratif. Sumber daya manusia baik *user* aktif, *user* pasif SIMAK-BMN, maupun manajemen puncak serta organisasi Balai Bahasa Yogyakarta menerima dan mengimplementasikan SIMAK-BMN sebagai sistem yang mumpuni. Meskipun SIMAK-BMN merupakan sistem yang fleksibel karena meningkatkan optimisme *user*, SIMAK-BMN belum mampu memberikan inovasi kepada *user*; artinya tingkat inovasi dengan

keberadaan SIMAK-BMN belum tercapai.

Implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta disebut sukses. Hal ini dikarenakan SIMAK-BMN sudah memenuhi fungsi pengendalian. Berdasarkan kutipan hasil wawancara, menunjukkan jika satuan kerja Balai Bahasa Yogyakarta terbantu dengan adanya SIMAK-BMN dalam pengelolaan barang milik negara, baik inventarisasi, perlengkapan, dan aset. Dari segi pelaporan lebih tertata dan dari segi kinerja lebih baik daripada sebelum menggunakan SIMAK-BMN.

Namun kesuksesan implementasi SIMAK-BMN mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi selama implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa meliputi teknis dan nonteknis. Permasalahan teknis yang dihadapi yaitu pertama, ketika *update* aplikasi dari pusat selalu mendekati akhir periode pelaporan sehingga menghambat ketepatan pelaporan dari satuan kerja, hal ini dikarenakan setiap terjadi *update* aplikasi sering terjadi *error*. Kedua, permasalahan dari pencetakan label barang yang didasarkan pada NUP yang menyebabkan kurang penghematan dari segi kertas, jika didasarkan pada tahun maka selain menghemat kertas juga menghemat waktu pengerjaan. Ketiga, petugas mengalami kesulitan saat harus menginput data inventaris atau persediaan sebelum ada aplikasi karena harus *merecord* tahun pembelian, cv tempat pembelian dan hal-hal yang terkait lainnya misal, petugas yang mengetahui pembelian dulu telah pensiun Keempat, regulasi yang berkaitan dengan batas

kapitalisasi yang dimulai tahun 2018. Permasalahan nonteknis meliputi dokumen sumber yang tidak lengkap pada saat petugas BMN akan melakukan penginputan belanja modal atau keuangan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di Balai Bahasa sehingga harus merangkap pekerjaan. Selain itu *background* pendidikan yang berbeda di bidang teknis.

Beberapa solusi untuk meminimalisasi atau menyelesaikan masalah adalah koordinasi informal dan formal. Koordinasi informal ialah koordinasi yang dilakukan setiap harinya ketika jam kerja antar pegawai perlengkapan, persediaan dan inventaris. Koordinasi formal ialah koordinasi yang dilakukan antar petugas BMN yang dilaksanakan paling tidak dua bulan sekali. Jika tidak dapat diselesaikan maka lapor ke bagian KPKNL. Kalau dari KPKNL tidak mendapatkan solusi, kemudian ke eselon 1 dibagian pengembangan dan pembinaan bahasa dan jika tidak mendapatkan solusi, dilanjutkan ke level atasnya yaitu di kementerian lebih tepatnya di biro keuangan.

5. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini antara lain (1) implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta jika di analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLon dan McLean (2003) disimpulkan, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, dukungan manajemen puncak, kepuasan pengguna dan manfaat bersih, memengaruhi kesuksesan implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa Yogyakarta, tetapi faktor penggunaan cukup mempengaruhi

kesuksesan implementasi SIMAK-BMN. SIMAK-BMN dikatakan sebagai suatu sistem yang fleksibel karena semakin meningkatkan optimisme pengguna SIMAK-BMN untuk menerima dan mengimplementasikan, tetapi belum memberika inovasi pada pengguna SIMAK-BMN. *User* SIMAK-BMN dan dukungan manajemen puncak serta organisasi Balai Bahasa Yogyakarta dalam tahap belajar dan membangun *strategic assets*. (2) Permasalahan yang dihadapi selama implementasi SIMAK-BMN di Balai Bahasa meliputi teknis dan nonteknis.

(3) beberapa solusi untuk meminimalisasi atau menyelesaikan masalah adalah koordinasi informal, dan formal.

6. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat mendapatkan bukti dokumen terkait permasalahan karena setiap ada masalah biasanya selalu diselesaikan melalui rapat

Daftar Pustaka

- Cresswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DeLone. W. H. dan McLean, E. R. 1992. *Information System Success: The Quest for the Dependent Variable*. Journal of Management Information System 3. No. 1 : 60-95
- DeLone. W. H. dan McLean, E. R . 2003. *The DeLone dan McLean Model of Information System Success: A Ten-Year Update*. Journal of Management Information System 19. No. 4 :90-30
- Fevryan, Rezhi. 2015. *Analisis Audit Operasional Dalam Proses Produksi (Studi Kasus pada PT Percetakan Manuntung Press Samarinda)*. Eournal Ilmu Adminitrasi Bisnis.911-922
- Hennik, Monique., Hutter, Inge, Bailey., Anjay. 2012. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
- Jogiyanto, Hartono, M. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Edisi II. Yogyakarta: ANDI

koordinasi baik informal maupun formal. Peneliti tidak melakukan obesevarsi secara langsung di kantor Balai Bahasa Yogyakarta karena keterbatasan waktu dan penelitian yang dilakukan bersamaan dengan periode audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kementerian.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran antara lain DJPB hendaknya memperhatikan dan memperhitungkan waktu saat akan mengupdate aplikasi tidak mendekati akhir periode pelaporan sehingga tidak menghambat dalam melakukan penginputan dan pelaporan; *skill* dan kemampuan sumber daya manusia dibidang teknis ditingkatkan; bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, hendaknya melakukan obsevarsi langsung ke satuan kerja terkait dan menambah jumlah narasumber wawancara sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan perspektif lebih luas atas hasil penelitian.

- Jogiyanto, Hartono, M. 2007. *Ssitem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Jogiyanto, Hartono, M .2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. 2018. Yogyakarta: ANDI
- Nasrudin, Edy. 2015. *Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia*. Program Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rahardiyanti, A.K., Abdurachman, E. (2012). *Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia*. Journal of Applied Finance and Accounting, Vol.5 No.1. Hal. 110-128;
- Saputro, Pujo Hari., Budiyanto, A. Djoko., Santoso Alb. Joko. 2015. *Model Delone and Mclean untuk Mengukur Kesuksesan E-government Kota Pekalongan*. Scientific Journal of Informatics Vol. 2, No. 1
- Sekaran, Uma., dan Bougie Roger. 2017. *Metode Peneltian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Teech, D.J., G. Pisano dan A. Shuen. 1997. *Dynamic Capability and Strategic Management*, Strategic Management Journal, 7, 21-28.
- Trisna Dewi,S.A.N dan Dwirandra, AANB. 2013. *Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 (2013): 196-214
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Wijaya, H., Nadirsyah dan Darwanis. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.3 No.1. Hal. 21-28;
- Yin, K. Robert. 2015. *Case Study Research: Design and Methods*. Diterjemahkan

oleh M. Dzuaji Mudzakir.
Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada